



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) KECAMATAN PONTIANAK
BARAT KOTA PONTIANAK
TAHUN 2023**

Jl. Tabrani Ahmad Pontianak

Telp. (0561) 772425 email: kecamatanpontianakbarat@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Barat tahun 2023 dapat diselesaikan. Walaupun masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan di masyarakat.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai (outcome) selama kurun waktu satu tahun yang pedoman pada tujuan dan sasaran serta formulasi yang realistis. Dengan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Pontianak Barat dapat menyelaraskan dengan potensi, Keadaan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dalam suatu akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai acuan dalam Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dimana sangat diperlukan adanya integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab lingkungan strategis yang cepat berubah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023 ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan demi perbaikan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
1. BAB I	
PENDAHULUAN	
2. BAB II	
HASIL EVALUASI RENJA RENCANA KERJA SAMPPAI DENGAN TRIWULAN	
II TAHUN 2023	
3. BAB III	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4. BAB IV	
PENUTUP	

BAB.I.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada Tahun 2023 Kecamatan Pontianak Barat mengharapkan dapat terakomodirnya semua Program dan Kegiatan dalam KUA-PPAS dan penetapan APBD Tahun 2023, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pontianak Barat mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- 1 Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 2 Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
- 3 Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan

rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Penyusunan Renja PD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja PD;

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan PD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan tujuan dan sasaran
9. Penelaahan usulan
10. Perumusan kegiatan prioritas;
11. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
12. Penyempurnaan rancangan Renja PD;
13. Pembahasan forum PD; dan
14. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja PD.

1. Menyusun Renja PD;
2. Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
3. Rancangan Renja PD memuat kebijakan , program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
4. Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru , indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukkan prakiraan maju;

5. Rancangan Renja PD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 52).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 53.3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 5).

24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 63).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 79).
27. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019 tentang SOP dan Format Produk Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 61).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2023 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2023 dengan dokumen renja PD Tahun 2023 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB. II.
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2023 pada Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menguraikan tentang hasil Evaluasi Renja tahun berjalan 2023, dengan acuan pada Rencana Strategis (Renstra). Untuk capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Pontianak menguraikan pada Pencapaian Kinerja Evaluasi Terhadap Renja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak yang meliputi :

1. Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan:
2. Pelaksanaan program dan kegiatan:
3. Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok yaitu :

1. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD;
2. Konsisten dengan Rencana strategis:
3. Program Kegiatan yang diutamakan:
4. Masalah yang ada dan perlu diatasi:
5. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya

Analisis capaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Pontianak Utara Barat Kota Pontianak berdasarkan pada Perubahan ke 2 Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 dengan indikator program dan target renstra PD telah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak pada Evaluasi Rencana Kerja (Renja) sampai dengan triwulan II tahun 2023 capaian realisasi sebesar 54,15% masih terdapat beberapa kegiatan yang seharusnya direalisasikan pada triwulan II namun terealisasi pada triwulan III atau bulan Juli, diantaranya:

Kegiatan DAU pada anggaran Kas terletak di Triwulan Ke II baru akan dilaksanakan di Triwulan Ke III. Untuk evaluasi Renja Perangkat daerah Sampai Dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1 (tabel laporan capaian target kinerja triwulan 2 hasil asistensi)

REKAM LAYANAN PELAYANAN KEARIFAN BUDAYA DAN TRADISI
SMPN 10 JOMBANG - TAHUN 2014/2015

No	Tipe/Status (Baru/Baru)	Program/Kelembagaan (Baru/Baru)	Jumlah Siswa (Baru/Baru)	Jumlah Guru (Baru/Baru)	Tipe/Status (Baru/Baru)				Jumlah Siswa (Baru/Baru)				Jumlah Guru (Baru/Baru)				Kategori (Baru/Baru)	Status (Baru/Baru)	Kategori (Baru/Baru)	Status (Baru/Baru)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
2	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
3	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
4	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
5	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
6	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
7	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
8	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
9	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
10	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
11	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
12	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
13	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
14	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
15	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
16	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
17	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
18	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
19	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	
20	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	

No	Tipe/Status Materi	Fungsi/Keperluan Materi	Materi Pokok Bahasan/Topik Materi	Indikator/Competency	Tipe/Status/Keperluan/Indikator Materi (Materi Pokok Bahasan)			Tipe/Status/Keperluan/Indikator Materi (Keperluan Kompetensi)			Tipe/Status/Keperluan/Indikator Materi (Keperluan Keterampilan)			Tipe/Status/Keperluan/Indikator Materi (Keperluan Sikap)			Tipe/Status/Keperluan/Indikator Materi (Keperluan Pengetahuan)			Total Keperluan	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					

No	Kategori Pekerjaan	Keterangan Pekerjaan	Keterangan Pekerjaan	Keterangan Pekerjaan	Kategori Pekerjaan				Kategori Pekerjaan				Kategori Pekerjaan				Kategori Pekerjaan	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1
2
3
4
5
Total				

Nama Perusahaan:
 Tanggal: 20 Mei 2023
 Lokasi:
 Dibuat oleh:
 No. Dokumen:

Keterangan:
 10% = ...
 20% = ...
 30% = ...
 40% = ...
 50% = ...

BAB.III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak tahun 2023, sebagai rangkaian Penyusunan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak tahun 2023 dengan mempedomi Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana kerja adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin setiap tahun ;
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan ;
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Kelurahan se Kecamatan Pontianak Barat.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan/sub kegiatan itu

sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan/sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu.

Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan instruktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, maka arah kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam Tabel C.3.1 (terlampir)

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PONTIANAK BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.00.01.0000 KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
						Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja Tokol Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
7	01																						
UNSUR KEWILAYAHAN																							
KECAMATAN											9,538,957,490	9,979,759,766									14,281,328,37		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											7,911,156,690	8,542,228,966									11,420,629,06		
7	01	01	2.0			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						31,028,700	31,028,700								149,660,900		
7	01	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	13 Dokumen	13 Dokumen	90 %	90 %	8,744,000	8,744,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	8,925,000		
7	01	01	2.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	90 %	90 %	7,960,000	7,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	7,960,000		
7	01	01	2.0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	3,200,000	3,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	9,200,000		
7	01	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	8 Laporan	8 Laporan	90 %	90 %	6,124,800	6,124,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	13,110,000		
7	01	01	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	7 Laporan	7 Laporan	90 %	90 %	4,999,900	4,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	110,465,900		
7	01	01	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											6,571,976,790	7,216,878,399						8,876,125,000
7	01	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	49 Orang/bulan	48 Orang/bulan	90 %	90 %	6,040,216,390	6,685,117,999	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	8,112,000,000		
7	01	01	2.0	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	90 %	90 %	525,320,000	525,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	742,920,000		
7	01	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	1,442,400	1,442,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	1,380,000		
7	01	01	2.0	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	0 Dokumen	0 Dokumen	90 %	90 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	755,000		
7	01	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	90 %	90 %	4,998,000	4,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	18,600,000		

7	01	01	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah		90 %	90 %	0 Dokumen	0 Dokumen	90 %	90 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	470,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																1,000,000	1,000,000				1,510,000
7	01	01	2.0	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	90 %	90 %	1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	1,510,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																61,690,000	59,290,000				144,080,000
7	01	01	2.0	02	Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	100 Stel	96 Stel	90 %	90 %	61,690,000	59,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	69,080,000
7	01	01	2.0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah		90 %	90 %	0 Orang	0 Orang	90 %	90 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	75,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah																146,067,900	146,067,900				609,230,000
7	01	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	90 %	90 %	3,005,000	3,005,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	47,000,000
7	01	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	90 %	90 %	81,093,600	81,093,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	284,670,000
7	01	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	90 %	90 %	14,924,300	14,924,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	69,410,000
7	01	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	90 %	90 %	25,145,000	25,145,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	46,550,000
7	01	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	90 %	90 %	12,000,000	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	56,700,000
7	01	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	120 Dokumen	120 Dokumen	90 %	90 %	9,900,000	9,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	9,900,000
7	01	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah		90 %	90 %	0 Laporan	0 Laporan	90 %	90 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	95,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																4,009,200	4,009,200				100,000,000
7	01	01	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	6 Unit	6 Unit	90 %	90 %	4,009,200	4,009,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	100,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																960,184,100	958,971,517				1,133,583,487

7	01	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	90 %	90 %	232,055,300	230,842,717	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	261,653,567
7	01	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	90 %	90 %	728,128,800	728,128,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %	871,929,920
7	01	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											135,200,000	124,983,250				406,439,675
7	01	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan Target Kinerja (Outcome)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 0	90 0	18 Unit	18 Unit	90 %	90 %	98,240,000	88,023,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 0	193,548,000
7	01	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan Target Kinerja (Outcome)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 0	90 0	48 Unit	48 Unit	90 %	90 %	36,960,000	36,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 0	84,891,675
7	01	01	2.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhab	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 0	90 0	0 Unit	0 Unit	90 %	90 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 0	128,000,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											1,109,324,900	1,080,974,900				1,223,661,575
7	01	02	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											57,974,900	50,474,900				172,311,575
7	01	02	2.0 1	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	57,974,900	50,474,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	172,311,575
7	01	02	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											1,051,350,000	1,030,500,000				1,051,350,000
7	01	02	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	1,051,350,000	1,030,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	1,051,350,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											148,140,700	123,900,700				977,037,471
7	01	03	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											76,499,100	73,499,100				106,200,000
7	01	03	2.0 1	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	4 Laporan	4 Laporan	90 %	90 %	76,499,100	73,499,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	90 %	106,200,000
7	01	03	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											71,641,600	50,401,600				870,837,471
7	01	03	2.0 2	01	Peningkatan Partisipasi Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		90 %	90 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	90 %	90 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	90 %	138,777,000
7	01	03	2.0 2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaiabeliung	90 %	90 %	3 Unit	3 Unit	90 %	90 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	90 %	250,000,000
7	01	03	2.0 2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	Jumlah Pokmas dan O	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		90 %	90 %	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	90 %	90 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	90 %	399,895,000
7	01	03	2.0 2	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	7 Laporan	7 Laporan	90 %	90 %	71,641,600	50,401,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	90 %	82,165,471
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											25,000,000	12,320,000				75,000,000

7	01	04	2.0	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										25,000,000	12,320,000											75,000,000												
7	01	04	2.0	2	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban terhadap layanan masyarakat	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	20 Laporan	20 Laporan	90 %	90 %	25,000,000	12,320,000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90 %		75,000,000																
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		345,335,200	220,335,200											585,000,266						
7	01	05	2.0	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																		345,335,200	220,335,200											585,000,266				
7	01	05	2.0	1	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Presentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap pelayanan masyarakat	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90 %	90 %	50,000,000	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Presentase Koordinasi penyelenggara urusan pemerintahan umum	an 0 % 9		100,000,000																
7	01	05	2.0	1	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Presentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap pelayanan masyarakat	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3 Kegiatan	3 Kegiatan	90 %	90 %	295,335,200	220,335,200	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Presentase Koordinasi penyelenggara urusan pemerintahan umum	an 0 % 9		485,000,266																
TOTAL																		9,538,957,490	9,979,759,766																				14,281,328,37
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PONTIANAK BARAT																																							
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.01.0001 KELURAHAN SUNGAI JAWI DALAM																																							
Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024																						
							Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target																		
7																																							
7	1																																						
7	1	1																																					
7	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		7,010,000	7,010,000									7,500,000						
7	01	01	2.0	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	90 %	90 %	1,741,400	1,741,400	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %		2,000,000																
7	01	01	2.0	6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	90 %	90 %	5,268,600	5,268,600	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %		5,500,000																
7	01	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		5,719,700	5,719,700									6,000,000						
7	01	01	2.0	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	90 %	90 %	16 Unit	16 Unit	90 %	90 %	5,719,700	5,719,700	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %		6,000,000																
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		249,696,500	249,696,500											71,000,000						
7	01	03	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		249,696,500	249,696,500											71,000,000				
7	01	03	2.0	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	90 %	90 %	8 Lembaga Masyarakat	8 Lembaga Masyarakat	90 %	90 %	18,035,200	18,035,200	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	90 %		31,000,000																

7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	90 %	90 %	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	90 %	90 %	231,661,300	231,661,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	90 %	40,000,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	8,900,000	8,900,000			9,000,000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	8,900,000	8,900,000			9,000,000
7	01	04	2.0	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap Pelayanan Masyarakat	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	90 %	90 %	20 Laporan	20 Laporan	90 %	90 %	8,900,000	8,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90 %	9,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	19,705,000	19,705,000			25,000,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																	19,705,000	19,705,000			25,000,000
7	01	05	2.0	04	Pembinaan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Kegiatan Pembinaan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap Pelayanan Masyarakat	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	90 %	90 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	90 %	90 %	19,705,000	19,705,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase koordinasi penyelenggara urusan pemerintahan umum	an 0 % g	25,000,000
TOTAL																	291,031,200	291,031,200	(SJD)		118,500,000
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PONTIANAK BARAT																					
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.05.0.00.01 KELURAHAN SUNGAI JAWI LUAR																					
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN																
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
7	01	01	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah																
7	01	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	90 %	90 %	1,750,000	1,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	2,500,000
7	01	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	90 %	90 %	5,454,500	5,454,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	4,500,000
7	01	01	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
7	01	01	2.0	06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	90 %	90 %	14 Unit	14 Unit	90 %	90 %	5,750,000	5,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	7,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
7	01	03	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																
7	01	03	2.0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan 2. Persentase LPM aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	90 % 0	90 % 0	8 Lembaga ormas	8 Lembaga ormas	90 %	90 %	17,990,100	17,990,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan 2. Persentase LPM aktif	90 % 0	30,000,000
7	01	03	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan 2. Persentase LPM aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	90 % 0	90 % 0	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	90 %	90 %	233,310,200	233,310,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan 2. Persentase LPM aktif	90 % 0	30,000,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	4,200,000	4,200,000			8,000,000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	4,200,000	4,200,000			8,000,000
7	01	04	2.0	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban terhadap layanan masyarakat	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	90 %	90 %	4,200,000	4,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90 %	8,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	14,651,200	14,651,200			20,000,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																	14,651,200	14,651,200			20,000,000

7	01	05	2.0	1	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Kegiatan Pem	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap Pelayanan Masyarakat	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaiawi Luar	90 %	90 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	90 %	90 %	14,651,200	14,651,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase koordinasi penyelenggara urusan pemerintahan umum	an 0 % 9	20,000,000
TOTAL																	283,106,000	283,106,000	(sji)			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KELURAHAN SUNGAI BALIUNG

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
						Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Sesudah	Program	Sesudah	Program	Sesudah														
UNSUR KEWILAYAHAN																									
KECAMATAN																	289,984,700	289,984,700							112,177,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	12,493,100	12,493,100							14,677,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	6,743,100	6,743,100							8,677,000
7	01	01	2.0	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaiabelung	90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	90 %	90 %	1,789,000	1,789,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	2,977,000			
7	01	01	2.0	6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaiabelung	90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	90 %	90 %	4,954,100	4,954,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	5,700,000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	5,750,000	5,750,000							6,000,000
7	01	01	2.0	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaiabelung	90 %	90 %	16 Unit	16 Unit	90 %	90 %	5,750,000	5,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	6,000,000			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	251,922,200	251,922,200							70,500,000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	251,922,200	251,922,200							70,500,000
7	01	03	2.0	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan 2. Persentase LPM aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaiabelung	90 % 0	90 % 0	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	90 % 90 %	90 % 90 %	20,152,500	20,152,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan 2. Persentase LPM aktif	90 %	20,500,000			
7	01	03	2.0	3	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan 2. Persentase LPM aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaiabelung	90 % 0	90 % 0	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	90 % 90 %	90 % 90 %	231,769,700	231,769,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan 2. Persentase LPM aktif	90 %	50,000,000			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	10,256,400	10,256,400							11,000,000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	10,256,400	10,256,400							11,000,000
7	01	04	2.0	2	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Meningkatnya koordinasi ketertamanan dan ketertib terhadap layanan masyarakat	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaiabelung	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	10,256,400	10,256,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90 %	11,000,000			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	15,313,000	15,313,000							16,000,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																	15,313,000	15,313,000							16,000,000
7	01	05	2.0	1	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Kegiatan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap Pelayanan Masyarakat	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaiabelung	90 %	90 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	90 %	90 %	15,313,000	15,313,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase koordinasi penyelenggara urusan pemerintahan umum	an 0 % 9	16,000,000			
TOTAL																	289,984,700	289,984,700	(belung)				112,177,000		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.01.0004 KELURAHAN PAALLIMA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah											
						Sebelum	Sesudah									Sebelum	Sesudah					
7	1		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1		KECAMATAN													287,487,000	287,487,000			112,750,000		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													13,728,800	13,728,800			15,750,000		
7	01	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah													7,986,700	7,986,700			8,250,000
7	01	01	2.0	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	90 %	90 %	1,748,000	1,748,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	1,750,000
7	01	01	2.0	6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	90 %	90 %	12 Paket	12 Paket	90 %	90 %	6,238,700	6,238,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	6,500,000
7	01	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													5,742,100	5,742,100			7,500,000
7	01	01	2.0	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	90 %	90 %	14 Unit	14 Unit	90 %	90 %	5,742,100	5,742,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	7,500,000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													250,708,200	250,708,200			70,000,000		
7	01	03	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													250,708,200	250,708,200			70,000,000
7	01	03	2.0	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan 2. Persentase LPM aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	90 %	90 %	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	90 %	90 %	20,000,400	20,000,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan 2. Persentase LPM aktif	90 %	30,000,000
7	01	03	2.0	2	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan 2. Persentase LPM aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	90 %	90 %	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	90 %	90 %	230,707,800	230,707,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan 2. Persentase LPM aktif	90 %	40,000,000
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													7,150,000	7,150,000			7,000,000		
7	01	04	2.0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													7,150,000	7,150,000			7,000,000	
7	01	04	2.0	2	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Meningkatnya koordinasi dan ketertiban terhadap layanan masyarakat	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	90 %	90 %	12 Laporan	12 Laporan	90 %	90 %	7,150,000	7,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90 %	7,000,000
7	1	5	PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													15,900,000	15,900,000			20,000,000		
7	01	05	2.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah													15,900,000	15,900,000			20,000,000	
7	01	05	2.0	1	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Kegiatan Pembinaan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap Pelayanan Masyarakat	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	90 %	90 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	90 %	90 %	15,900,000	15,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase koordinasi penyelenggara urusan pemerintahan umum	90%	20,000,000
											TOTAL	287,487,000	287,487,000	(pallima)			112,750,000					

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2023 , mengakibatkan terjadinya efisiensi anggaran terhadap beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Bertambah sebesar Rp 644.901.610,00 karena adanya penambahan Gaji dan TPP
 2. Administrasi Kepegawaian
 - Penyediaan pakaian dinas
 - Efisiensi sebesar Rp 2.400.000,00
 3. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Umum
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Efisiensi sebesar Rp.1.212.583,00
 4. Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan alat angkutan daaarat bermotor servis/pemeliharaan kendaraan roda 4
 - Efisiensi sebsar Rp. 6.422.750,00
- 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi Vertikal / Terkait
 - Efisiensi pada Kegiatan Musrenbang sebesar Rp 7,500.000,00
 - 2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
 - Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Kegiatan Operasional RT dan RW Efisiensi sebesar Rp .1.500.000,00
- 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 1. Evaluasi Kelurahan
 - Efisiensi anggaran pada kegiatan lomba dikelurahan sebesar Rp .21.240.000,00
- 4 Program Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - Efisiensi pada kegiatan HUT RI sebesar Rp .50.000.000,00

- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas keamanan lokal,Regional dan Nasional

- Efisiensi kegiatan Hut Kota,Hari Besar Keagamaan sebesar Rp 75.000.000,00

5 Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

- 1 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah

- Efisiensi dikegiatan operasional sebesar Rp.12.680.000,00

3.2 Pendanaan

Belanja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2023 dalam RKPD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 10.216.050.000,00 di APBD 2023 menjadi 10.690.566.390,00 dan di RKPD Perubahan menjadi sebesar Rp 11.131.368.666 (%) Rp.11.735.220.305,00 terdiri dari:

1. Belanja Operasi pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar Rp.6.685.118.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.644.901.610,00 APBD Tahun 2023 sebesar Rp.6.040.216.390,00 dengan Rincian :

- ✓ Belanja Pegawai

Pada perubahan sebesar Rp 6.685.118.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 644.901.610,00 dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6.040.216.390,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Pada perubahan sebesar Rp 4.446.250.666,00 mengalami pengurangan sebesar Rp 204.099.333,00 dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4.650.350.000,00

3. Belanja Modal

Pada perubahan sebesar Rp 4.009.000,00 tidak mengalami penambahan / pengurangan

Pada Tahun 2023 dimana terdapat perbedaan antara target dan persentase di renja dan restra dikarenakan ada kegiatan yang pagunya mengalami efisiensi anggaran.

BAB V

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2023, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2022 ini sebagaimana telah ditargetka pada Renstra Perubahan Kedua Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka menunjang tercapaian target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak tahun 2023 disusun untuk pedoman bagi pelaksanaan program-program di Kecamatan Pontianak Barat. Harapan kami, meningkatkan Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Anggaran Tahun 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.

CAMAT PONTIANAK BARAT,



IBRAHIM.S.IP,M.Si

NIP.19690211199901005